

Nomor : B/526/AA.05/2023

27 November 2023

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

Yth. Sekretaris Daerah Kota Manado

di

Manado

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Pemerintah Kota Manado, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Manado. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kota Manado telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Manado yang dilengkapi formulasi perhitungan, penjelasan dan sumber data;
- b. Menetapkan penanggungjawab data dan informasi kinerja level Perangkat Daerah (PD) yang dimasukkan dalam aplikasi dan telah melakukan pengukuran kinerjanya.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Manado menunjukkan bahwa nilai sebesar **70,39** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Sangat Baik**", yaitu implementasi **SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	23,31	23,42
b. Pengukuran Kinerja	30	20,70	20,76
c. Pelaporan Kinerja	15	10,77	10,85
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,28	15,36
Nilai Hasil Evaluasi	100	70,06	70,39
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Manado tahun 2023 sebagai berikut:

a) Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan pada dokumen perencanaan pada tingkat Pemerintah Kota Manado dan Perangkat Daerah (PD) belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi. Hal tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang ditetapkan tidak memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat;

- Pada level PD pemanfaatan pohon kinerja sebagai dasar untuk penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan, sehingga keselarasan antara pohon kinerja yang telah disusun dengan dokumen perencanaan belum tergambar dengan baik;
- Masih terdapat PD yang belum menyusun *Cascading*/penjenjangan kinerja dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor*. Penyusunan penjenjangan kinerja juga belum memuat pola *crosscutting* kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi.

b) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Meskipun telah memiliki pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara berbasis sistem informasi, namun belum terlihat komitmen dari seluruh PD untuk mau memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai sarana pemantauan dan evaluasi capaian kinerja, hal ini dibuktikan belum adanya *feedback* perbaikan dari pimpinan PD terkait pencapaian kinerja yang tidak tercapai;
- Belum dimanfaatkannya hasil pengukuran kinerja pada level Pemda maupun PD sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi serta sebagai dasar pemberian *reward* and *punishment* pada pegawai di Pemerintah Kota Manado.

c) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Laporan Kinerja Pemerintah Kota Manado sudah disertai dengan analisis cukup lengkap dengan melibatkan analisis ketercapaian, data pembandingan (target realisasi, tahun sebelumnya, target jangka menengah), faktor hambatan/pendukung, solusi atas permasalahan, dan analisis efisiensi ketercapaian kinerja serta menginformasikan program atau kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja. Sedangkan pada beberapa PD Laporan Kinerja belum memiliki informasi yang lengkap sebagai dasar pelaporannya;
- Informasi kinerja yang telah dituangkan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Manado dan PD belum dimanfaatkan dengan baik, terutama pada proses penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja kedepan.

d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum

memberikan rekomendasi yang cukup dan menysar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh PD dalam mengimplementasikan SAKIP, serta pelaksanaan pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi internal belum dilakukan secara berkala untuk mendorong pencapaian kinerjanya;

- Belum terdapat kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Mereviu dan memperbaiki rumusan Tujuan dan Sasaran Strategis pada dokumen perencanaan tingkat Pemerintah Kota Manado dan PD untuk memastikan seluruh Tujuan/Sasaran Strategis menjawab isu strategis yang dihadapi. Hal tersebut untuk memastikan program dan kegiatan yang ditetapkan memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat;
- b) Pada PD yang belum menyusun pohon kinerja, agar menyusun pohon kinerja sebagai dasar perencanaan kinerjanya;
- c) Mereviu dan memperbaiki pohon kinerja pada PD yang sudah disusun, namun belum mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor (CSF)* dan telah memuat pola *crosscutting* kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi. Sedangkan bagi PD yang telah memiliki pohon kinerja yang tepat, pohon kinerja tersebut diharuskan dimanfaatkan sebagai dasar untuk penyusunan dokumen perencanaan, sehingga keselarasan antara pohon kinerja yang telah disusun dengan dokumen perencanaan dapat tergambar dengan baik;
- d) Meningkatkan komitmen seluruh PD dalam hal pemanfaatan hasil pengukuran dan pengumpulan data kinerja sebagai sarana pemantauan dan evaluasi capaian kinerja. Komitmen dapat berupa adanya *feedback* perbaikan dari pimpinan PD terkait pencapaian kinerja yang tidak tercapai;
- e) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja pada level Pemerintah Kota Manado maupun PD sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi serta sebagai dasar pemberian *reward and punishment* pada pegawai di Pemerintah Kota Manado;
- f) Memperbaiki kualitas Laporan Kinerja Kinerja beberapa PD, terutama dalam hal penyajian analisis cukup lengkap dengan melibatkan analisis ketercapaian, data perbandingan (target realisasi, tahun sebelumnya, target jangka menengah),

faktor hambatan/pendukung, solusi atas permasalahan, dan analisis efisiensi ketercapaian kinerja serta menginformasikan program atau kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja;

- g) Memanfaatkan dengan baik informasi kinerja pada Laporan Kinerja Pemerintah Kota Manado dan PD, terutama pada proses penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja kedepan;
- h) Memperbaiki kualitas Laporan Hasil Evaluasi dengan memuat rekomendasi yang cukup dan menysasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh PD dalam mengimplementasikan SAKIP. Selain itu pelaksanaan pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi internal harus dilakukan secara berkala untuk mendorong pencapaian kinerjanya;
- i) Menyusun dan menetapkan kebijakan *reward* and *punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Manado. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Manado dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sulawesi Utara;
4. Wali Kota Manado.